

HUKUM PERKAWINAN ANAK GADIS TANPA IZINNYA
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

SKRIPSI

Oleh :

Fatimatus Zahroh
NIM. C06216007



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimatus Zahroh

NIM : C06216007

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya
Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Fatimatus Zahroh
NIM.C06216007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatus Zahroh C06216007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Desember 2019

Pembimbing,



H.Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., M.HI., Dip.Lead.


NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatus Zahroh NIM. C06216007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., M.HI., Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji II




Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji III



Drs. H. Sumarkan, M. Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, M.H
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 23 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP: 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatimatus Zahroh
NIM : C06216007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address : fatimatuszahroh109@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HUKUM PERKAWINAN ANAK GADIS TANPA IZINNYA MENURUT MAZHAB
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Februari 2020

Penulis

(Fatimatus Zahroh)

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam agama Islam sangat dianjurkan, Islam memandang bahwa perkawinan memiliki nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah SWT.¹ Perkawinan merupakan akad yang menggunakan lafat nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.² Membujang atau tidak berkeinginan untuk menikah adalah hal yang tidak dibenarkan. Pada dasarnya perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan untuk mewujudkan ketentraman hidupnya dalam bermasyarakat.³ Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (Q.S An-Nur :32)

³ Ahmad Azhar Bashir, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 12.

Perkawinan bukan semata-mata hanya untuk melakukan hubungan badan atau saling memberikan nafsu biologisnya, melainkan perkawinan dalam Islam yaitu menunaikan perintah Allah SWT sekaligus ibadah guna melahirkan ketentraman dalam hidup dan kebahagiaan yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁶

nan Rasjid, *Fiqh Islam, Cct. Ke-25*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), 348.

azid, *Islam Akomodatif Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: Lkis, 2016).

nan Rasjid, *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 374-

Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum DiIndonesia*, Cct.Ke-2, (Bandung: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 261.

⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum DiIndonesia*, Cet.Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 261.

[illegible]

- Calon mempelai laki-laki
- Calon mempelai perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Ijab dan qobul.¹⁴

¹³ Wabbāh az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid IX*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 45.

[illegible]

Fiqih Islam menyatakan bahwa perempuan tidak berhak menentukan pilihan dalam memilih pasangan hidupnya. Dalam hal ini yang menentukan adalah walinya yaitu ayah atau kakek. Karena kehadiran wali dalam suatu perkawinan adalah syarat sahnya suatu akad perkawinan.¹⁸ Hal ini langsung menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatar belakangi oleh suatu pemahaman terhadap hak *ijbar*. Hak *ijbar* merupakan memaksakan suatu perkawinan tanpa meminta izin karena itu menjadi hak wali yaitu ayahnya. Sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam

¹⁸ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 394.

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah dewasa atau janda kecuali dengan persetujuannya.²⁰ Apabilah dinikahkan tanpa izinnya maka nikahnya dihukumi *mauquf* (digantungkan keabsyahan nikahnya), karena hak wali *ijbar* dalam pandangan Abū Ḥanīfah adalah hanya bagi anak kecil yang belum baliq atau perempuan dewasa tapi gila. Sedangkan wanita yg sudah dewasa atau janda sudah berhak menentukan pasangan hidupnya tanpa meminta persetujuan atau izinnya.²¹

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Wali nikah menurut Imam Asy-Syafi'i memiliki dua hak yaitu hak *ijbariyah* dan hak *ikhtiyariyah*. Wali yang memiliki hak *ijbar* yaitu ayah dan kakek menurut Syafi'i, seorang wali yang mempunyai hak *ijbar* disebut wali mujbir dimana wali tersebut berhak menikahkan anak gadisnya baik yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa tanpa izinnya. Adapun meminta persetujuan adalah hal yang disunnahkan. Sedangkan hak *ikhtiyariyah* adalah hak wali

²¹ Abi Muhammad Mahmud bin Muhammad Al-Aini, *Al-Binayat fī Syarh al-Hidayat, cct.ke-2 Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1990), 584.

menikahkan janda dengan syarat meminta izin terlebih dahulu dengan jelas.²²

Hak *ijbariyah* merupakan kekuasaan ayah terhadap anak perempuannya untuk kawin dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hak untuk mengawinkan. Ijbar seorang ayah bersifat tanggung jawab ayah terhadap putrinya dalam mengawinkan putrinya. Madzhab Syafi'i dikaitkan dengan beberapa persyaratan yaitu:

1. Tidak ada permusuhan (kebencian) terhadap calon suaminya
2. Tidak ada permusuhan antara perempuan dan ayahnya
3. Sekufu (setara atau sebanding)
4. Mahar
5. Calon suami tidak akan melakukan perbuatan yang menyakiti hati perempuan.²³

Masyarakat pada masa Asy-Syafi'i mengatakan bahwa beberapa persyaratan diatas menjadi ukuran minimal bagi kerelaan perempuan tersebut yang dikawinkan dengan seorang laki-laki tanpa meminta izin. Dengan demikian menurut Imam Asy-Syafi'i boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil (belum baligh) atau yang sudah dewasa

²² Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VII*, (Beirut: Dār al-Qutaybah, tt), 39.

²³ Imam Puji Dwisatrio, *Analisis Kedudukan Wali Mujbir Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), 34.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka saya tertarik untuk meneliti masalah tersebut lebih mendalam dengan menulis skripsi yang berjudul “Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”.

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah.²⁴ Identifikasi masalah juga memiliki arti sebagai salah satu proses untuk mengetahui permasalahan dalam menguasai situasi tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas dapat diidentifikasi yang kemudian ditemukan beberapa permasalahan maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Hukum perkawinan dalam Islam
2. Syarat dan rukun perkawinan dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974

[illegible]

Sehubungan dengan adanya identifikasi masalah yang sudah di jelaskan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini diberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya.
2. Metode istinbāṭ Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya.
3. Analisis komparatif terhadap persamaan dan perbedaan antara Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya.

Rumusan masalah adalah kajian pokok dari suatu kegiatan penelitian, oleh sebab itu sebelum penelitian dilakukan, agar prospek

1. Bagaimana pandangan Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafī'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya?
2. Bagaimana Metode istinbāṭ Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafī'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya?
3. Bagaimana analisis komparatif persamaan dan perbedaan Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafī'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya?

Perkawinan yang dilakukan terhadap anak gadisnya tanpa meminta izin terlebih dahulu merupakan kasus yang sering terjadi dan sering diperbincangkan dimasyarakat luas sehingga masih aktual dalam penelitian serta kajian ilmiah. Kajian pustaka merupakan penggambaran ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan sehingga menggambarkan dengan jelas bahwa penelitian ini tidak termasuk duplikasi kajian penelitian yang sudah ada.²⁵ Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti antara lain:

[illegible]

²⁷ Muhammad Ihsan Armia, *Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqn Dan Gender*, (Malang: UIN Muhammad Malik Ibrahim Malang, 2011).

Rifi Hamdani tahun 2013 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul *"Tradisi Perjodohan Dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta"*. Penelitian ini lebih membahas tradisi perjodohan dan tidak terfokuskan terhadap Mazhab tertentu.²⁸ Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji, lebih khusus tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya terhadap pandangan dua Mazhab yang berbeda pendapat yakni Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta metode penelitian yang saya gunakan yakni studi komparatif.

²⁸ Rifi Hamdani, *Tradisi Perjodohan Dalam Masyarakat Madura Migran diKecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

²⁹ Sry Irnawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri' Tahun 2013-2015)*, (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2015).

1. Judul skripsi ini berbeda dengan skripsi sebelumnya yang sudah dipaparkan di atas
2. Skripsi ini lebih terfokuskan kepada Mazhab tertentu yaitu pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i
3. Skripsi ini menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i

Tujuan penelitian merupakan titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan merupakan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapailah sesuatu yang dituju.³⁰ Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditulis di atas adalah sebagai berikut:

[illegible]

Definisi operasional digunakan untuk memperjelas arah pembahasan suatu masalah serta menghindari penyimpangan terhadap skripsi penulis, maka perlu adanya penjelasan tentang definisi dari judul hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Asy-Syafi'i tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut.

- [illegible]

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bahan pustaka merupakan bahan primer, dalam ilmu penelitian bahan pustaka digolongkan sebagai data sekunder, adapun bahan dan sumber data adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber data yang berasal dari literatur mazhab Hānafi adalah *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq*. Sedangkan sumber data yang berasal dari literatur Mazhab Syafi'i adalah *Al-Umm*.

- 1) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*
- 2) *al-fiqh ‘ala Mazāhib Al-arbā’ah*
- 3) *Al-fiqh ala Mazāhib Al-khamsah*
- 4) *Al-Bīnayat fī Syarh Al-Ḥidayat*
- 5) *Fiqih tujuh Mazhab*
- 6) *Halal dan haram dalam Islam*
- 7) *Fiqh Munakahat*

4. Teknik pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan yaitu untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh mengenai kejelasan data, sesuai data yang satu dengan yang lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok data mengenai hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka sistematika yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu

c. *Analizing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing yang telah diperoleh dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.³⁴ Dalam hal ini ialah hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif. Hasil penelitian diklasifikasikan secara detail dan sistematis, diperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.³⁵ Tujuan hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Analisis dalam kegiatan ini adalah mengorganisir data dari informan yang sudah terkumpul dengan mengelompokkan data berdasarkan dari seluruh informan. Metode komparatif

r Jayanti Muhammad, *skripsi Tujuan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat “pl Lamahoda Kc.Adoonara Kab.Flores Timur Nusa Tenggara Timur*,(Surabaya: IAIN el,,2013), 18.

sruhah, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

h. Nazhir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah,1999), 62.

di Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 57.

³⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 57.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafī yang pembahasannya meliputi biografi, metode istinbāḥ, dan pendapat Mazhab Hanafī.

Bab ketiga berisi tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Syafi'i yang pembahasannya meliputi biografi, metode istinbath, dan pendapat Mazhab Syafi'i.

Bab keempat berisi tentang analisis komparatif hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafī'i yang pembahasannya meliputi analisis persamaan dan perbedaan.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan tersebut yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi pembahasan yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG HUKUM PERKAWINAN ANAK GADIS TANPA IZINNYA

a. Biografi Akademik Imam Abū Ḥanīfah

Pendiri Mazhab Ḥanafī lahir di kota Kūfah pada tahun 80 Hijriah (699 Masehi). Pendiri Mazhab Ḥanafī bukanlah keturunan bangsa Arab asli melainkan berasal dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab) lahir di tengah-tengah keluarga bangsa Persia.³⁹ Abū Ḥanīfah hidup pada masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan pada masa Dinasti Abbāsiyyah 18 tahun. Dengan demikian Abū Ḥanīfah mengetahui hiruk-pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua

³⁹ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. 7, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 19.

101 Hijriah, Imam Abū Ḥanīfah sudah menjelang dewasa.

Masa pertumbuhan Imam Abū Ḥanīfah masih terbilang beruntung karena kota tempat beliau tinggal memiliki empat sahabat Rosulullah. Sahabat itu bernama:

1. Anas bin Malik di Basrah
2. Abdullah bin Abī Aufa di Kūfah
3. Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah
4. Abū al-Thufail, Amir bin Wailah di Makkah⁴⁰

Ayah Imam Abū Ḥanīfah bernama Tsābit dilahirkan dalam Islam, ayahnya merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul- Afganistan). Sebelum Abu Ḥanīfah dilahirkan Ayahnya sudah pindah di kota Kūfah. Ayahnya merupakan seorang pedagang. Kakek Abū Ḥanīfah bernama Zautha yang merupakan suku (bani) Tamin. Sedangkan ibunya tidak terkenal dikalangan ahli sejarah namun Imam Abū Ḥanīfah sangat menghormati dan taat terhadap ibunya.

Abū Ḥanīfah dilahirkan dalam keluarga muslim yang terpandang, Imam Abū Ḥanīfah merupakan anak semata wayang dari ayahnya yaitu Tsābit seorang pedagang sutra di Kūfah, namun Abū Ḥanīfah tidak mengikuti ayahnya sebagai penjual kain. Abū Ḥanīfah tidak pernah datang kepengajian yang digelar oleh ulama namun setelah didatangi oleh ash-Shāṭibī dimana ash-Shāṭibī merupakan orang yang

⁴⁰ Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 94-95.

memberi pengaruh besar pada kehidupan Abū Ḥanīfah. Sehingga pendiri Madzhab Ḥanafī tersebut sering menghadiri pengajian dan majelis para ulama.⁴¹

b. Guru-Guru Imam Abū Ḥanīfah

Pendiri Mazhab Ḥanafī dikenal sebagai orang yang rajin belajar dan haus akan ilmu pengetahuan. Catatan sejarah menunjukkan dimana ada guru atau ulama besar yang terkenal dengan kemampuan ilmunya menarik perhatian Imam Abū Ḥanīfah untuk berguru kepadanya. Oleh sebab itu hingga sekarang terdapat 200 ulama besar yang pernah dijadikan guru oleh Abū Ḥanīfah.

Para guru akademik Abū Ḥanīfah sudah tentu bukan ulama sembarangan mereka berasal dari ulama terkenal dan tabi'in pada masanya, misalnya: Ibrahim al-Nakhai (w. 95 Hijriah), Amir bin Syārahil al-Syā'bin (w.104 Hijriah), Imam Ātha bin Abī Rabah (wafat 114 H), Imam Nafi Maulana Ibnu Umar (wafat 117 H), Imam Hammad bin Abū Sulaimān (wafat 120 H).⁴²

c. Murid-murid Imam Abū Ḥanīfah

Abū Ḥanīfah sebagai pendiri Madzhab yang terkenal sudah tentu memiliki banyak murid. Murid ini bukan hanya murid akademik Imam Abū Ḥanīfah melainkan juga menyebarkan pengetahuannya. Dalam beberapa buku diceritakan murid-murid tersebut bernama:

⁴¹ Tim Batartama PP Sidogiri, *Trilogi Ahlusunnah: Akidah, Syariah dan Tasawuf...*, 215-216.

⁴² Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab...*, 22-23.

2. Imam Abū Yūsuf Ya'qūb ibn al-Anshari

Imam Abū Yūsuf merupakan keturunan Arab yang lahir pada tahun 113 Hijriah. Ketika masih kecil Abū Yūsuf hidup dalam kemiskinan. Ia dapat melanjutkan belajarnya atas bantuan Imam Abū Ḥanīfah. Abū Yūsuf merupakan golongan ulama ahli hadits yang terkemuka dan meninggal pada tahun 182 Hijriah.⁴⁴

Imam Muhammad bin al-Ḥasan al-Syāibani dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 Hijriah. Sejak kecil tinggal di Kūfah setelah itu pindah ke Baghdad dan berdiam disana. Imam Muhammad bin al-Ḥasan al-Syāibani sejak mudanya belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan tentang agama serta mempelajari ilmu tentang hadits kemudian belajar kepada Imam Hanafi. Ketika Abū Ḥanīfah meninggal, usia Imam Muhammad

⁴⁴ Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah...*, 103.

4. Imam Ḥasan bin Ziyād al-Lu'lu'i

d. Keilmuan Imam Abū Ḥanīfah

Pendiri Mazhab Ḥanafi bukanlah ulama yang sembarangan. Abū Ḥanīfah dikenal telah mampu menghafal al-Qurʿān sejak masih kecil. Setiap bulan Ramaḍān sudah menghatamkan al-Qurʿān beberapa kali. Guru belajar Imam Abū Ḥanīfah dalam al-Qurʿān dikenal bernama Imam Āshim yang merupakan seorang yang pakar dalam tujuh bacaan yang autentik (*Qirāʾah Sabʾah*). Setelah belajar dari Imam Āshim, Abū Ḥanīfah langsung belajar as-sunnah di kota Madinah dan Makkah.⁴⁷ Selain kecerdasan dibidang al-Qurʿān ulama lain juga memuji kecerdasan dalam memecahkan masalah keagamaan. Oleh sebab itu Imam asy-Syāʿbi memberi anjuran agar Abū Ḥanīfah belajar ilmu pengetahuan.⁴⁸

⁴⁸ Hendri Andi Bastomi, *101 Kisah Tabi'in*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), 46.

Imam Abū Ḥanīfah menekuni ilmu fiqh di kota Kūfah di mana pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh. Abū Ḥanīfah belajar ilmu fiqh dari Hammad ibn Sulaimān dan sering kali pergi ke Hijjaz untuk memperdalam ilmu fiqh dan hadits untuk tambahan dari ilmu yang diperoleh sebelumnya. Setelah mendalami ilmu fiqh maka reputasi Abū Ḥanīfah terhadap ilmu fiqh sangatlah menonjol dan cemerlang. Setelah Hammad ibnu Sulaimān wafat majelis Kūfah sepakat mengangkat Abū Ḥanīfah menjadi kepala madrasah. Abū Ḥanīfah banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa itulah yang menjadi dasar utama pemikiran Madzhab Hanafi yang dikenal sampai saat ini.⁵¹

Abū Ḥanīfah dikenal sebagai ulama yang tidak haus akan kekuasaan dan jabatan. Oleh sebab itu dalam catatan sejarah Abū Ḥanīfah pernah menolak jabatan hakim dua kali pada masa Dinasti

⁵¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet. 1, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1997), 95.

e. Karya-karya Imam Abū Ḥanīfah

1. *Asy-Syurūt* kitab yang membahas mengenai perjanjian
2. *Al-Fara'id* kitab yang membahas mengenai masalah waris menurut hukum Islam

⁵³ Abu 'Ameenah Bilal Phillis, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh*, (Bandung: Nusamedia, 2005), 113.

Daqā'iq karya Hafizuddin an-Nasafi, kitab *Tabyīn al-Ḥaqā'iq* karya az-Zaila'i dan lain-lain.⁵⁶

B. Metode Istinbat Mazhab Hanafi tentang Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya

Istinbāṭ adalah pengarah kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara' sampai ketingkat *zhanni*.⁵⁷ Istinbāṭ yang digunakan Imam Abū Ḥanīfah dalam memecahkan suatu masalah ada tujuh yaitu:⁵⁸

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dimana fungsi dari al-Qur'an yaitu sebagai petunjuk, hakim, dan sebagai penjelas. Pada dasarnya al-Qur'an digunakan untuk menentukan sumber-sumber lain yang bertentangan dengan al-Qur'an dianggap tidak benar.⁵⁹

2. Sunnah

Al-Sunnah atau al-Hadits adalah sesuatu yang berasal dari Nabi baik berupa perbuatan, perkataan dan persetujuan yang pantas

⁵⁶ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), 58-59.

⁵⁷ Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, Cet.7, (Jakarta: KENCANA, 2017), 223.

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrat, *Tarikh 'al-Madhabih 'al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Matba'ah al Madanni, tt), 274.

⁵⁹ Mocnawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab.*, 77.

3. Pendapat para sahabat

4. Qiyās

⁶⁰ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīs ‘Ulūmuh wa Mustalahuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 19.

⁶² Abu ‘Ameenah Bilal Phillis, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh...*, 89.

5. İhtihās̃

Ihtihās̃an adalah mengalihkan hukum dari suatu masalah karena ada dalil tertentu baik dari kitab ataupun hadits karena menurut mujtahid dalil tersebut lebih baik menurut akal.⁶³ Menurut salah satu tokoh Imam Hanafi mengatakan bahwa Ihtihās̃an sama dengan qiyas. Dalam Madzhab Hanafi Ihtihās̃an dibagi menjadi dua yang pertama Ihtihās̃an dengan qiyās yang merupakan peralihan dari qiyās, yang kedua Ihtihās̃an dengan dalil syari'at yang merupakan berpindahkannya kaidah umum karena darurat atau alasan sunnah.

6. Ijma'

Ijma' memiliki arti kesepakatan, ketetapan dan keputusan. Para ulama sepakat bahwa ijma' bisa dijadikan hujjah untuk menentukan hukum syara'. Adapun pengertian syara' adalah kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis.

7. Urf

Urf merupakan adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat umat Islam. Para ulama sepakat jika *urf* bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits maka *urf* tersebut tidak bisa diterima.⁶⁴

⁶³ Abdul Karīm Ibn ‘Alī ‘Annamlātī, *Raudatul Manāzīr fī ‘Usulilfiqhī*, (Beirut: Muasasa Kutub, 1998), 244.

⁶⁴ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab...*, 79.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggal kan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya yaitu di beri nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Dan allah maha perkasa lagi maha bijaksan.” (al-Baqharah:240).⁶⁶

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa perkawinan tidak harus menggunakan wali. Imam Abū Ḥanīfah dan beberapa penganutnya berpendapat bahwa aqad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak.⁶⁷ seorang gadis dewasa janda atau perawan mempunyai hak dan kedudukan

⁶⁷ Mohd. Idris Kamulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 5.

Imam Abū Ḥanīfah dan salah satu muridnya yang bernama Imam Abū Yūsuf berpendapat dalam riwayat dari Zuffa bahwa perkawinan yang dilakukan oleh wanita dewasa tanpa persetujuan wali adalah sah karena wanita tersebut bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri.⁶⁸ Adapun dalil yang digunakan oleh Ulama Ḥanafiah adalah dengan berhujjah kepada al-Qurʾān, hadits dan logika. Seorang gadis adalah orang yang paling berhak dalam suatu perkawinan. Adapun dalam kitab *Tabyīn al-Ḥaqāʾiq* karangan Uthman Ibn Ali al-Zaylaʿi al-Ḥanafī menjelaskan dalam kitab tersebut yaitu:

وَمَا رَوَاهُ حَمُودٌ عَلَى أَمَةٍ رَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ أَذِنٍ سَيِّدِهَا أَوْ صَغِيرَةٍ أَوْ جُنُونَةٍ ائْتَهَى وَكُتِبَ مَا نَصَّه رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ ائْتَهَى غَايَةً. قَوْلُهُ: (بِأَنَّ النِّكَاحَ صَادِرٌ مِنْهَا) لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى فَاعِلِهِ ائْتَهَى فَتَحْ. قَوْلُهُ: (الْأَيْمَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا إلخ)

وَوَجْهَهُ إِلَّا سِتْدَ لَالٍ أَنَّهُ أَتَبَتْ لِكُلِّ مِنْهَا وَمِنَ الْوَلِيِّ حَقًّا فِي ضَمَنِ قَوْلِهِ أَحَقُّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ سِوَى مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ إِذَا رَضِيَتْ وَقَدْ جَعَلَهَا أَحَقُّ مِنْهُ بِهِ ائْتَهَى فَتَح. قَوْلُهُ (أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا).^{٦٩}

Artinya: Menangguhkan pernikahan budak pada izin sayyidnya dan perempuan yang belum dewasa serta perempuan gila pada izin walinya. (pernikahan dalam alih perempuan) karena hakikatnya menyandarkan perbuatan pada pelakunya. (الأعم) lebih berhak

⁶⁹ Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Ḥanafī, *Tabyīn al-Ḥaqā'iq*, Jilid II, (Beirut: Dar Kutb Al Ilmiyah, 2013), 494.

Hal ini menunjukkan bahwa ayah, saudara, dan kerabat lainnya tidak memiliki hak untuk menikahkan atau memaksakan gadis tanpa izinnnya dalam hal perkawinan. Sesuai sabda Rosulullah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبُكَرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذَا نَهَا سُكُونُهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَإِنِّي لَقَطٌ (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الشَّيْبِ أَمْرٌ ، وَالْبَيْتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ) . ر . ر . أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .

Artinya: Dari Ibn Abbās, Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda:, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri (mengurus) dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan dimintai izinnya. Tetapi izinnya itu adalah diamnya”.⁷²

Hadits di atas merupakan hadits shahih dimana Ibn Abbās meriwayatkannya dari Nabi SAW. Hadits shahih adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW.⁷³ Dimana hadits di atas boleh dijadikan dalil, hadits tersebut menjadi pengambilan dasar hukum kedua Imam Abū Yūsuf dimana beliau adalah murid Imam Abū Ḥanīfah. Hadits diatas menjelaskan bahwa janda ataupun gadis perawan yang sudah dewasa memiliki hak bagi dirinya sendiri. Maka dalam hal perkawinan wali tidak boleh memaksakan kehendak sebelum meminta izin terlebih dahulu. Hadits lain yang sama yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى (لَا تُنْكِحُ الْإِيْمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكِحَ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: (أَنْ تَسْكُتَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

⁷¹ Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, *Bulughul Maram...*, 516.

⁷² Ahmad bin Syu'aib bin Ali an-Nasaa'i, *Kutubus Sittah, Sunan An-Nasaa'i*, (Beirut: Afkar Ad-Dauliyyah,tt). No. Hadits.3208.

⁷³ Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram...*, 21.

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: tidak boleh dikawinnkan seorang janda melainkan dengan sudah diajak rembuk, dan seorang perawan tidak boleh dikawinkan sebelum dimintai izinnya”. Mereka bertanya: ya Rasulullah, bagaimana izinnya itu?, beliau bersabda :, diamnya”.⁷⁴

لَا تُنْكَحْ لَأَيِّمٍ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحْ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْ نَهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ، وَفِي لَفْظٍ آخَرَ قَالَ: إِذْ نَهَا صَمًا تَهَا، وَفِي الْفَضْلِ الثَّلَاثِ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا وَإِذَا هُمَا سَكُوتًا.

Artinya: “Wanita yang tidak perawan (janda tidak bersuami) tidak berhak dinikahkan sebelum di mintai ijin nya terlebih dahulu, dan gadis tidak boleh di nikahkan sebelum di mintai persetujuannya.” Para sahabat bertanya, “Ya Rasullullah SAW, bagaimana cara dia (gadis) memberikan persetujuannya?” Beliau menjawab, “ dengan cara diam.” Dalam riwayat yang lain dinyatakan, ” persetujuan seorang gadis di mintai persetujuan ayahnya dan persejuannya adalah diamnya. (HR Bukhari Muslim)⁷⁵

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa dalam berijtihad mengenai hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya Imam Abū Ḥanīfah mengambil sumber hukum dari al-Qurʾān dan Hadits. Dimana dijelaskan bahwa seorang gadis yang sudah dewasa bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri. Wali bagi perempuan menurut Imam Abū Ḥanīfah boleh dilakukan dan sah. Sehingga dalam melaksanakan suatu perkawinan harus ada persetujuan dari mempelai perempuan atau gadis tersebut sesuai hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurairah dan Ibnu Abbas dimana hadits tersebut adalah hadits shahih. Sehingga wali harus meminta izin

⁷⁴ Ibid., 514.

⁷⁵ Hadist Shahih Diriwayatkan Oleh al-Bukhari No. 5135 dan Muslim No. 1419, dikutip: Syaikh Ibn Baz, *Islamic Fatawa Regerding Women*, Cet.II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 169.

terlebih dahulu terhadap anak gadisnya dalam melakukan suatu perkawinan.

C. Pendapat Mazhab Hānafi Tentang Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah kepada makhluk-Nya untuk berkembang biak dengan cara perkawinan.⁷⁶ Perkawinan memiliki kedudukan yang suci dalam masyarakat Islam dan merupakan karunia. Sesuai firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 72 yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِالنَّعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”⁷⁷

Nikah menurut bahasa adalah mengumpulkan, atau di ibaratkan sebagai hubungan intim laki-laki dan perempuan yang di iringi dengan akad, dalam Islam dikenal sebagai akad nikah. Sedangkan menurut istilah nikah adalah sesuatu hal yang dibolehkan untuk berhubungan intim dengan perempuan yang awalnya dilarang dan diperbolehkan karena adanya

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, t,t), 477.

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: ATLAS, 2000), 412.

perkawinan. Perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, maupun sesusuan. Nikah bisa diartikan sebagai kepemilikan yang memiliki hak terhadap laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya dan sudah halal bagi lelaki tersebut.⁷⁸

Ulama Hanafiyah mengartikan bahwa perkawinan merupakan hak kepemilikan lelaki terhadap perempuan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Artinya kehalalan laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dibolehkan karena adanya pernikahan. Perkawinan merupakan salah satu tindakan ibadah kepada Allah SWT. Alasan perkawinan adalah untuk melangsungkan hidup guna memperoleh keturunan.⁷⁹ sesuai firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum-21)⁸⁰

Gadis dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah anak perempuan yang sudah balig atau anak perempuan yang belum melakukan perkawinan. Sedangkan anak gadis menurut Imam Abū Hanīfah adalah

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid IX, (Beirut: Dār al-Fikr, t,th), 38-39.

⁷⁹ Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Hanafi, *Tabyin al-Haqā'iq*, Jilid II, (Beirut: Dār Al Kutb Al Ilmiah. 2000). 494-495.

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān ...*, 644.

perempuan yang belum bersuami baik dia perawan maupun tidak perawan.⁸¹

Rukun dalam suatu perkawinan menurut ulama Ḥanafiyah adalah akad nikah atau ijab dan qabul yang dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan yang lainnya seperti mahar dan saksi hanya dikelompokkan kedalam syarat perkawinan. Syarat shigat atau syarat ijab dan qabul suatu perkawinan menurut Imam Abū Ḥanīfah adalah sebagai berikut:

1. Harus dilakukan dengan lafal yang jelas
2. Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis
3. Setiap pengucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab
4. Harus didengar oleh ke dua belah pihak
5. Lafal yang diucapkan tidak mempunyai maksud nikah mut'ah atau kawin kontrak

Syarat bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan yaitu Islam, berakal, balig dan sudah merdeka. Sedangkan syarat. Kesaksian dilakukan oleh dua orang laki-laki atau dua perempuan satu laki-laki.⁸² Madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang mempunyai maksud nikah, sekalipun dengan

⁸¹ Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Hanafi, *Tabyin al-Haqā'iq...*, 494.

⁸² Wabbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 89-90.

Wali menurut Imam Abu Ḥanīfah tidak termasuk dalam rukun. Adapun hak ijbar wali haya bisa dilakukan terhadap perempuan yang belum balig atau anak gadis dewasa tapi gila.

Wali menurut Imam Abū Ḥanīfah tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap anak gadis dan tidak boleh meremehkan pendapatnya. Maka gadis yang sudah dewasa tidak boleh dikawinkan tanpa kerelaan atau izinnya. Apabila perkawinan terlanjur terjadi maka

⁸⁴ Syaikh Ibn Baz, *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*, Cet. II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 169-170.

perkawian tersebut dibekukan atas kerelan gadis tersebut akan tetapi bila gadis tersebut menolak maka perkawinan tersebut menjadi batal.⁸⁵

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat tentang hak wali *ijbar* yang dilakukan oleh ayahnya hanya berlaku bagi:

1. Anak Kecil

Wali terhadap anak kecil adalah ayahnya sendiri dan hak ijbar boleh dilakukan tanpa meminta izin.

2. Anak gadis yang dewasa tapi gila

Wali berhak menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tapi gila tanpa meminta izin. Hukum orang gila sama dengan hukum anak yang masih kecil.

3. Anak gadis yang idiot atau *safih*

Anak safih atau idiot menurut pendapat Imam Abū Ḥanīfah tidak sah perkawinannya tanpa izin dari wali.⁸⁶

Seorang gadis yang sudah dewasa memiliki hak dalam menentukan pilihannya dalam hal perkawinan.⁸⁷ Menurut Abū Ḥanīfah wanita yang sudah dewasa bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, maka ayah tidak mempunyai hak untuk menikahkan anaknya yang sudah

⁸⁵ Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Hanafi, *Tabyīn al-Haqā'iq..*, 495.

⁸⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab...*, 347.

⁸⁷ Syaikh Yusuf Qaradhwani, *al-Halal wa al-Haram fil Islam*, Penerjemah Tim Kuadran, Halal Dan Haram, (Bandung: Bone Pustaka, 2007), 185.

perkawinan anak gadis yang dilakukan ayahnya tanpa meminta izin perkawinan tersebut tidak sah, atau anak gadis tersebut bisa membatalkan perkawinannya.

perkawinan anak gadis yang dilakukan ayahnya tanpa meminta izin perkawinan tersebut tidak sah, atau anak gadis tersebut bisa membatalkan perkawinannya.

PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM PERKAWINAN ANAK GADIS TANPA IZINNYA

a. Biografi Akademik Imam Asy-Syafi'i

Pendiri Mazhab Syafi'i lahir di tengah-tengah keluarga miskin, dimana ayahnya meninggal ketika Syafi'i masih kecil dan hidup sebagai seorang anak yatim faqir dari keturunan bangsawan yang paling tinggi pada masanya. Kehidupan ayahnya tidak banyak diketahui, ibunya membawa Imam Asy-Syafi'i ke kota Mekkah dan hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Namun kedudukan Imam Asy-Syafi'i yang merupakan putra bernasab mulia menyebabkan terpelihara dari perangai buruk dan berjiwa besar.⁹⁰

⁹⁰ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17.

Al-Sa'ib merupakan pembawa bendera Bani Hasyim dalam perang Badar termasuk tawana yang akhirnya masuk Islam setelah menebus dirinya. Anaknyanya yaitu Syafi' adalah sahabat kecil karena pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ibnu Hajar berpendapat bahwa silsilah Imam Asy-Syafi'i terdapat empat orang sahabat yaitu Abd Yazid, Ubaid, al-Sa'ib, dan Syafi'.⁹³

⁹¹ Muhammad Ibrahim Salim, *Diwan 'al-Imām 'ash-Syāfi'i*, (Mesir: Maktabah 'ibn Sīnā, t.t), 3.
⁹² Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*, Cet.1, (Solo: Aqam, 2013), 12.
⁹³ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 14.
⁹⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i...*, 13.

Pendiri Madzhab Syafi'i dikenal sebagai orang yang rajin belajar dan haus akan ilmu pengetahuan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pendiri Madzhab Syafi'i ini berguru kepada 19 ulama yang paling terkenal diantaranya berasal dari Mekkah, Madinah, Yaman dan Irak menurut riwayat pendidikan Imam Asy-Syafi'i antara lain:

1. Guru yang berasal dari Mekah ialah Abdu Hamid bin Abdul Aziz bin Abī Dawud, Sufyan bin Uyainah, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan Dawud bin Abdurrahman Al-‘Atthar.
2. Guru yang berasal dari Yaman ialah Yahya bin Ḥasan, Mutharriḥ bin Mazin, Umar bin Abī Salamah, dan Hisyam bin Yūsuf..
3. Guru yang berasal dari Madinah ialah Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Malik bin Anas, Ibrahim bin Abī Yahya Al-Usami, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ashari, Muhammad bin Abī Sa'ad bin Abī Fadik, dan Abdullah bin Nafi Ash-Shana'.⁹⁶

⁹⁶ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab....*172.

Murid akademik yang menjadi penerus pemikiran Imam Asy-Syafi'i. Dalam beberapa buku diceritakan murid-murid tersebut bernama:

- ⁹⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i...*, 168-175.
⁹⁹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab...*, 228.
¹⁰⁰ Abu Ameenah Bilal Philis, *Asal Usul Perkembangan Fiqih*, (Bandung: Nusamedia, 2005), 113.

e. Karya-karya Imam Asy- Syafi'i

1. *Ar-Risalah*, kitab yang berisi tentang ilmu ushul fiqh.
2. *Al-Umm*, kitab yang berisi tentang persoalan ilmu fiqh. Dalam kitab *Al-Umm* cetakan baru merupakan karangan Imam Asy-Syafi'i seperti: kitab *Jami'ul Ilmu*, *Ar-Radduh*, *Ikhtilaful Hadits*, dan kitab *Al-Musnad*.

¹⁰⁸ Ahmad as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi...*, 188.

1. Kitab *Al-Fiqh* karangan Imam Al-Haramain bin Yahya karangan tersebut dikarang dengan cara imla' dari Imam Asy-Syafi'i
2. Kitab *Al-Mukhtasharul-Kabir*, *Al-Mukhtasharush-Shagir*, dan *Al-Faraidh* disusun oleh Imam Al-Buwaithy dari Imam Asy-Syafi'i
3. Kitab *Al-Mukhtasharul-Kabir*, *Al-Mukhtasharush-Shagir* dan dua kitab lainnya yaitu *Al-Jamiul-Kabir* dan *Al-Jamiush-Shagir* yang disusun oleh Imam Al Muzani dari Imam Asy-Syafi'i
4. Kitab *tafsir* dan kitab *adab* dan beberapa risalah yang belum diketahui nama-namanya.¹⁰⁹

B. Metode Istinbat Mazhab Syafi'i tentang Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya

Istinbat̃ yang digunakan Mazhab Syafi'i dalam memecahkan suatu masalah yaitu: al-Qur'an, Hadits, ijma', qiyas, dan Istidlal. Apabila ada suatu permasalahan ada dalam al-Qur'an dan hadits maka tidak boleh menggunakan metode lain karena dalam mengambil sumber hukum maka sumber hukum yang paling tinggi yang digunakan.¹¹⁰ Adapun penjelasan sebagai berikut:

¹⁰⁹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab...*, 241-244.

¹¹⁰ Muhammad Abū Zahra, *Tharikh al-Madhabih al-Fiqhiyyah*, (Kairoh: Matba'ah al Madanni, t.t), 274.

menyalahinya dan berpendapat bahwa terjadinya persamaan pemahaman bagi ulama maka itu tidak mungkin.¹¹³

4. Qiyās

Imam Asy-Syafi'i mengambil sumber hukum dari qiyas untuk dijadikan dalil apabila tidak ada dalil dari Al-Qur'an, hadits dan ijma'. Dalam menjatuhkan hukum qiyas tidak terburu-buru sebelum menyelidiki lebih dalam bisa atau tidaknya hukum qiyas itu dipergunakan sebagai dalil. Perubahan hukum yang ditetapkan dengan qiyas terjadi karena adanya perubahan mengenai hukum *ashl* dan nada kecacatan pada qiyas seperti cacat karena menentang dalil yang lebih kuat.¹¹⁴

5. Istidlal

Imam Asy-Syafi'i mengambil dasar hukum dari istidlal apabila sudah tidak ada dalil dari Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Jalan istidlal yaitu mencari alasan, bersandar pada qaidah-qaidah atau undang-undang agama meskipun dari agama ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Imam Asy-Syafi'i tidak mengambil dalil hukum dengan cara istihsan seperti yang dikerjakan para ulama dari pengikut Madzhab Hanafi dan lain-lain.¹¹⁵

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)”. (An-Nisa':34)

Artinya: “(karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah maskawin yang patut”. (An-Nisa’:25)¹¹⁶

Ar-Rabi' seorang muadzim sekaligus perawi kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i memberikan kepada kami Imam Asy-Syafi'i berkata: “Said bin Salim menceritakan dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Ibnu Musa, dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ra dari Nabi SAW beliau bersabda:¹¹⁷

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِإِذْنٍ وَلِيِّهَا فَبَكَتْ حَتَّى يَمُوتَ؟) فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أُسْتَحْلَ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا أَفَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَنْبَرِيُّ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَبُنِ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ. -

¹¹⁷ Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VIII*, (Beirut: Dār al-Qutaybah, tt), 182.

Artinya: “Dari Aisyah. Ia berkata: telah bersabda Rosulullah SAW:, seorang perempuan jika kawin dengan tidak izin walinya, maka nikahnya batal, dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya bayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu; jika mereka bertengkar maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.¹¹⁸

Hadits di atas merupakan hadits shahih. Hadits shahih adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW.¹¹⁹ Dimana hadits di atas boleh dijadikan dalil, hadits tersebut menjadi pengambilan dasar hukum Imam Asy-Syafi'i bahwa dalam sunnah Rasulullah SAW menunjukkan pengertian bahwa bagi wali memiliki hak terhadap putrinya dan tidak sempurna nikahnya kecuali dengan wali.¹²⁰ Riwayat lain menerangkan:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ).

Artinya: “dari Abi Burdah bin Abi Musa, dari bapaknya ia berkata: telah bersabda Rosulullah SAW:” tidak ada nikah melainkan dengan wali”.

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا (لَا نَكْحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ).

Artinya: “Dari Imam Ahmad diriwayatkan dari al-Hasan, dari Imran bin Hushain sebagai marfu’ sabdanya: “tidak ada perkawinan melainkan dengan wali dan dua saksi”.¹²¹

Hadits diatas menjelaskan bahwa perkawinan bisa dikatakan sah apabila adanya wali. Wali disini sangat penting dalam perkawinan karena merupakan salah satu rukun perkawinan. Hadits tersebut berpendapat bahwa gadis atau perempuan yang sudah dewasa tidak mempunyai hak

¹¹⁸ Ibnu Hajr Al ‘Asqalani, *Bulughul Maram*, terj, A. Hassan, (Bangil: CV DIPONEGORO, 1991), 513.

¹¹⁹ Ibnu Hajr Al ‘Asqalani, *Bulughul Maram...*, 21.

¹²⁰ Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VIII...*, 183.

¹²¹ Ibnu Hajr Al ‘Asqalani, *Bulughul Maram...*, 512.

dalam perwalian. Bahwa perwalian seorang gadis hanya terdapat pada ayah atau kakeknya.¹²² Sesuai hadits yang diriwayatkan dari *abi Ḥurairah* yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِ قُطْنِي وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Artinya: Dari Abi Huraira. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. : tidak boleh prempuan mengawinkan prempuan ,dan tidak boleh prempuan mengawinkan dirinya”¹²³

Hadits di atas diriwayatkan dia oleh Ibn majah dan Daraqunthi dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan. Hadits di atas memberikan penjelasan bahwa seorang gadis perempuan tidak memiliki hak atau kedudukan dalam suatu perwalian dalam perkawinan dan tidak boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri.

Imam Asy-Syafi'i beserta para penganutnya berpendapat mengenai perwalian dalam perkawinan dan kebolehan mengawinkan putrinya tanpa izin. Dimana salah satu syarat sahnya suatu perkawinan adalah adanya wali.¹²⁴ Sesuai pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* karangan beliau yaitu:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَيُّ وَلِيٍّ امْرَأَةٍ تَبَيَّنَ أَوْ بَكَرَ زَوْجَهَا بَعِيرٍ إِذْهَبَ فَالْتِمَاحُ بَاطِلٌ، إِلَّا الْأَبَاءَ فِي الْأَبْكَارِ، وَالسَّادَةَ فِي الْمَمَالِكِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ نِكَاحَ خُتَسَاءِ ابْنَةِ خُدَّامِ

¹²² Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 269.

¹²³ Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram...*, 515.

¹²⁴ Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VII*, terj. Ismail Yaqub, (Jakarta: C.V Faizan, 1984), 148.

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (Q.S An-Nur :32)¹³⁴

Gadis dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah anak perempuan yang sudah balig atau anak perempuan yang belum melakukan perkawinan. Sedangkan anak gadis menurut Imam Asy-Syafi'i adalah perempuan yang belum bersuami atau belum melangsungkan perkawinan baik dia tidak perawan maupun yang masih perawan (bikir).¹³⁵

Perkawinan dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat tersebut menentukan suatu perbuatan hukum

¹³⁵ Asy-Syafi'I, *Al-Umm Jilid VII...*, 163.

1. calon suami
2. calon istri
3. wali
4. saksi
5. ijab qabul.¹³⁷

¹³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59
¹³⁷ Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i...*, 268.
¹³⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 104.

Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap hak *ijbar*. Hak *ijbar* merupakan memaksakan suatu perkawinan terhadap anak gadis tanpa meminta izin karena itu menjadi hak wali. seorang wali yang mempunyai hak *ijbar* disebut wali mujbir. Wali mujbir merupakan wali yang berhak mengawinkan anak gadisnya tanpa adanya kerelan, wali mujbir tersebut adalah ayah kandung atau kakek apabila ayah tersebut sudah meninggal. Adapun meminta persetujuan adalah hal yang

¹⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan diLengkapi perbandingan UU Negara Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFa, 2004), 69-126.

disunnahkan. Sedangkan hak *ikhtiyariyah* adalah hak wali menikahkan janda dengan syarat meminta izin terlebih dahulu dengan jelas.¹⁴²

Syarat-syarat wali mujbir menurut madzhab Syafi'i yaitu Hak *ijbar* oleh wali mujbir dimana wali tersebut memiliki kekuasaan terhadap anak gadisnya untuk mengawinkan tanpa adanya kerelaan. hak tersebut tidak langsung bisa dipergunakan dan bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hak untuk mengawinkan. Ijbar seorang ayah bersifat tanggung jawab ayah terhadap anak gadisnya dalam melakukan perkawinan. Dalam madzhab Syafi'i wali mujbir memiliki syarat dalam mengawinkan anak gadisnya tanpa izin, syarat tersebut adalah:¹⁴³

1. Tidak ada permusuhan (kebencian) pterhadap calon suaminya
2. Tidak ada permusuhan antara perempuan dan ayahnya
3. Sekufu (setara atau sebanding)
4. Mahar
5. Calon suami tidak akan melakukan perbuatan yang menyakiti hati perempuan.¹⁴⁴

Syarat diatas apabila sudah dipenuhi oleh wali mujbir maka hal tersebut boleh dilakukan yaitu dalam perkawinan anak gadis tanpa

¹⁴² Asy-Syāfi'i, *Al-Umm, Jilid VII*, terj...,163.

¹⁴³ Mujahidin Nur, *Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 31.

¹⁴⁴ Imam Puji Dwisatrio, *Analisis Kedudukan Wali Mujbir Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), 34.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wali yang mengawinkan anak gadis yang tidak perawan atau gadis yang masih perawan (bikir) tanpa meminta izin maka perkawinannya batal kecuali oleh ayah kandungnya dan tuan budak wanita.¹⁴⁶ maka perkawinan yang dilakukan ayah terhadap putrinya tanpa meminta izin boleh dilakukan karena persyaratan diatas menjadi ukuran minimal bagi kerelaan perempuan tersebut yang dikawinkan dengan seorang laki-laki tanpa meminta izin.

¹⁴⁶ Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VII, terj...*, 162-163.

ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN ANAK GADIS TANPA IZINNYA MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Hānafi dan Mazhab Syafi'i. Dalam bab ini penulis akan menganalisis hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

¹⁴⁷ Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Ḥanafī, *Tabayīn al-Haqā'iq*, Jilid II, (Beirut: Dār Al Kutb Al Ilmiyah, 2000), 495.

[illegible]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْكَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذَا نَهَا سُكُونُهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَإِنِّي لَقَطٌ (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الشَّيْبِ أَمْرٌ ، وَالْبَيْتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ) . ر . ر . أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائُفِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .

Hadits di atas merupakan hadits shahih dimana Ibnu Abbas meriwayatkannya dari Nabi SAW. Hadits shahih adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW.¹⁵¹ Dimana hadits diatas boleh dijadikan

¹⁵¹ Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram...*, 21.

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa hadits di atas menjelaskan bahwa janda ataupun gadis perawan yang sudah dewasa memiliki hak bagi dirinya sendiri. Maka dalam hal perkawinan wali tidak boleh memaksakan kehendak sebelum meminta izin terlebih dahulu. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hadits di atas antara gadis perawan dan janda mengenai izin dalam perkawinan ada dua perkara, yaitu izin seorang gadis yang perawan adalah diam. Maka izin yang berbeda dengan diam adalah berbicara. Berbicara disini berbeda dengan diam. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa gadis perawan dan janda mengenai perwalian dari keduanya berbeda. Dimana janda lebih berhak dari pada walinya dan gadis boleh dikawinkan tanpa meminta izin.¹⁵²

Mazhab Hānafi melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak yang melangsungkan suatu perkawinan. Maka dari itu yang menjadi rukun perkawinan dari golongan ini adalah akad nikah saja yang dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang melangsungkan

[illegible]

perkawinan. Sedangkan yang lainnya seperti mahar dan saksi hanya dikelompokkan kedalam syarat perkawinan.¹⁵³

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa rukun perkawinan itu adalah segala sesuatu yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok dalam suatu perkawinan adalah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, akad, wali yang melangsungkan akad dengan sisuami, dua orang saksi yang menyaksikan akad perkawinan tersebut. Dalam pendapat golongan ini rukun perkawinan adalah.¹⁵⁴

Wali disini dalam pandangan Imam Syafi'i ada dua hak yaitu hak *ijbariyah* dan hak *ikhtiyariyah*.¹⁵⁵ Hak *ijbar* oleh wali mujbir memiliki kekuasaan terhadap anak gadisnya untuk mengawinkan tanpa izin. Objek wali mujbir dalam pandangan Imam Syafi'i adalah anak gadis (*al-bikr*) atau perempuan perawan yang *baliq* ataupun belum *baliq*. Karena yang menjadi illat atau alasan hukum terkaik berlakunya hak *ijbar* dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i yaitu ketika orang yang berada dalam perwaliannya berstatus anak perempuan yang masih gadis.¹⁵⁶

Sedangkan dalam pandangan Iman Abu Hanifah menjelaskan bahwa wali mujbir hanya berlaku bagi:

¹⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid IX*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 45.

¹⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 60-61.

155 Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 104.

¹⁵⁶ Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2...*, 274.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرِ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ كَرَّتْ : أَنَّ أَبَا هَا
زَوْجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ
ابْنُ مَاجَهَ وَ أَعْلَى بِالْإِسْـمَـالِ .

Hadits diatas merupakan hadits mursal dari sisi lain tidak mursal.

¹⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, 49.

¹⁶¹ Mohd. Idris Kamulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 5.

[illegible]

wali bagi dirinya sendiri. Dalam kitab *Tabyīn al-Haqā'iq* karangan Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Hanafi yaitu:

وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدٌ عَلَى أَمَةٍ زَوْجَتْ نَفْسَهَا بَعِيرٌ أَذِنَ سَيِّدُهَا أَوْ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ ائْتَهَى وَكُتِبَ
مَا نَصَّهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ائْتَهَى غَايَهُ. قَوْلُهُ: (بِأَنَّ النِّكَاحَ صَادِرٌ مِنْهَا) لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ إِسْنَادِ
الْفِعْلِ إِلَى فَاعِلِهِ ائْتَهَى فَتَحَّ. قَوْلُهُ: (الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا إلخ)
وَوَجْهُهُ إِلَّا سِتْدَ لَالِ أَنَّهُ أَتَتْ لِكُلِّ مِنْهَا وَمِنَ الْوَلِيِّ حَقًّا فِي ضَمَنِ قَوْلِهِ أَحَقُّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ
لِلْوَلِيِّ سِوَى مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ إِذَا رَضِيَتْ وَقَدْ جَعَلَهَا أَحَقُّ مِنْهُ بِهِ ائْتَهَى فَتَحَّ. قَوْلُهُ (أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
مِنْ وَلِيِّهَا). ١٦٣

Artinya: Menangguhkan pernikahan budak pada izin sayyidnya dan perempuan yang belum dewasa serta perempuan gila pada izin walinya. (pernikahan dalam alih perempuan) karena hakikatnya menyandarkan perbuatan pada pelakunya. (الأيم) lebih berhak terhadap dirinya), الأيم adalah perempuan yang belum bersuami baik dia perawan maupun janda.

Dalam pengambilan dalilnya adalah memberi ketetapan pada perempuan dan bagi wali punya hak menjamin dan melangsungkan akat nikah apabila perempuan yang mau menikah meridhoinya. (perempuan lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya)

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa gadis atau perempuan yang sudah dewasa tidak mempunyai hak dalam perwalian. Perwalian seorang gadis hanya terdapat pada ayah atau kakeknya.¹⁶⁴ Sesuai hadits Nabi yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارُ قُطْنِي وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

¹⁶³ Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Hanafi, *Tabyin al-Haqā'iq...*, 494.

¹⁶⁴ Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2...*, 269.

1. Tidak ada kebencian terhadap calon suaminya
2. Tidak ada permusuhan antara perempuan dan ayahnya
3. Sekufu
4. Mahar
5. Calon suami tidak akan melakukan perbuatan yang menyakiti hati perempuan.¹⁷³

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wali yang mengawinkan anak gadis yang tidak perawan atau gadis yang masih perawan (bikir)

¹⁷⁴ Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2...*, 274.

a. Persamaan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذَا نَهَا سُكُونُهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَإِنِّي لَقَطِ (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الشَّيْبِ أَمْرٌ ، وَالْبَيْتِمْهُ تُسْتَأْمَرُ) . ر . أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ .

Hadits di atas menjadi landasan hukum pengambilan Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafī'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya. Hadits di atas merupakan hadis shaheh dan bisa dijadikan hujjah dalam pengambilan dasar hukum.

¹⁷⁶ Ahmad bin Syu'aib bin Ali an-Nasaa'i, *Kutubus Sittah, Sunan An-Nasaa'i*..., No. 3208.

2. Perwalian dalam perkawinan

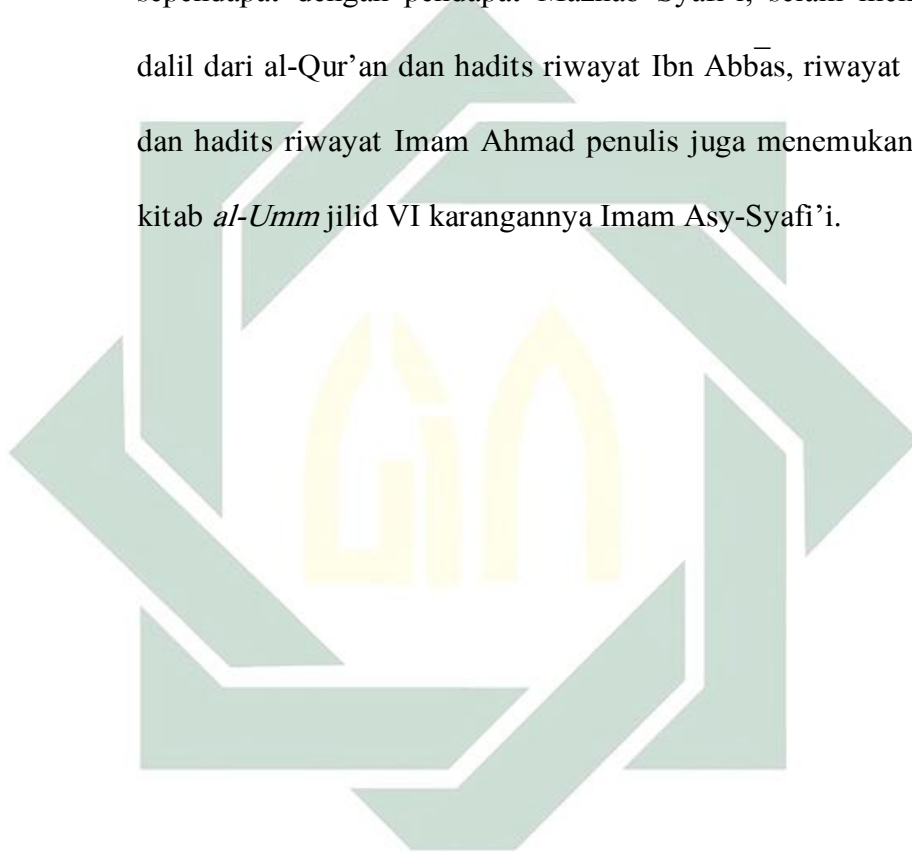
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa gadis atau perempuan

Perwalian seorang gadis hanya terdapat pada ayah atau

¹⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, 49.

Dalam istinbāt hukumnya Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafī'i sama-sama mengambil dari hadits yang diriwayatkan dari Ibn Abbās meskipun mereka berbeda penafsiran. pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafī'i sama-sama benar. Tetapi penulis sependapat dengan pendapat Mazhab Syafī'i, selain mengambil dalil dari al-Qur'an dan hadits riwayat Ibn Abbās, riwayat Aisyah dan hadits riwayat Imam Ahmad penulis juga menemukan dalam kitab *al-Umm* jilid VI karangannya Imam Asy-Syafī'i.



PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 82

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- [illegible]

- Djaliel, Maman Abd. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Dwisatrio, Imam Puji . *Analisis Kedudukan Wali Mujbir Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Universitas Pasundan. 2016
- Hambal, bin Ahmad. *Musnad Ahmad. Juz IV*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Hamdani, Rifi. *Tradisi Perjudohan Dalam Masyarakat Madura Migran diKecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013
- Al-Hanafi, Uthman Ibn Ali al-Zayla'i. *Tabyin al-Haqa'iq. Jilid II*. Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah. 2000
- Hajar, Ibn. *Tawali Al-Ta'sis fi Ma'ali Muhammad ibn Idris*. Beirut: Dar Al Fikr. 1986
- Hasan, M Ali. *Perbandingan Madzhab* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika. 2010
- Irnawati, Sry. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua diKelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri' Tahun 2013-2015)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2015
- Kamal, Abu Malik .*Shaih Fiqh Sunnah*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007
- Khalaf, Abd al-Wahhab. *Sejarah Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Uṣūl al-Hadīs 'Ulūmuh wa Mustalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr. 1989
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Bandung: al-Ma'arif. 1981
- Malik, Arif Jamaluddin .*Studi Hadits*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2011
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000

- Mughniyak, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama. 1996
- Muhammad Al-Aini, bin Abi Muhammad Mahmud. *Al-Binayat fi Syarh al-Hidayat. cet.ke-2 Juz IV*. Beirut: Dar al-Fiqr. 1990
- Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: Lkis. 2001
- Muhammad, Jayanti Nur. *skripsi Tujuan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat "plaeka" Di Desa Lamahoda Ke.Adoonara Kab.Flores Timur Nusa Tenggara Timur*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 2013
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001
- Nasution,Khoiruddin. *Hukum Perkawinan diLengkapi perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA. 2004
- Nazhir,Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indah. 1999
- Nur, Mujahidin. *Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018
- Philis, Bilal.Abu Ameenah. *Asal Usul Perkembangan Fiqih* . Bandung: Nusamedia. 2005
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011
- Purnomo, Usman. Husain. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Askara. 2008
- Qaradhawi, Yusuf Syaikh. *al-Halal wa al-Haram fil Islam*, Penerjemah Tim Kuadran, Halal Dan Haram. Bandung: Bone Pustaka. 2007
- Al-Rahman, al-Jaziri Abd. *al-fiqh 'ala Madhahib al-arba'ah*, Bairut: Dar Al-Kutub al- Ilmiah.2003
- Ramulyo, Moh.Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Cet. Ke-25*. Bandung: CV Sinar Baru. 1992

- Rasyada, Dede. *Hukum Islam dan Prenata Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 1993
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam diIndonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.cet.3. 1998
- Salim, Muhammad Ibrahim. *Diwan ‘al-Imam ‘ash-Syafi’i*. Mesir: Maktabah ‘ibn Sīnā. t.t
- Al-Shayis, Muhammad Ali. *Sejarah Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2003
- Shomad,Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum DiIndonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. cet.2. 2012
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006
- Asy-Syafi’i. *Al-Umm. Jilid VII*. Beirut: Dar al-Qutaybah. 2003
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006
- Syalthut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Madzhab*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Imam Syafi’i Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*. Cet.1. Solo: Aqwam. 2013
- As-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991
- Tritrosudibio,Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2004
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Cet.1. Jakarta: Logos Wacan Ilmu. 1997
- Yazid, Abu. *Islam Akomodatif Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. Yogyakarta: Lkis. 2004
- Zahra, Muhammad Abū. *Tharikh al-Madhahib al-Fiqhiyyah*. Kairoh: Matba’ah al Madanni. t.t
- Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Cet.7. Jakarta: KENCANA. 2017

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. jilid IX. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: ATLAS. 2000
- Tim Batartama PP Sidogiri. *Trilogi Ahlusunnah: Akidah, Syariah dan Tasawuf*. Pasurusn: Pustaka Sidogiri. 2012
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015
- UU RI No.1 tahun 1974 tentang *perkawinan*. Jakarta: Wacana Intelektual. 2007

